



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

NOMOR 14/D-KES/TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN STANDAR PELAYANAN
PUSKEMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 119);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Pelayanan Puskesmas sebagaimana Diktum Kesatu disusun untuk menjamin kepastian pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK


SAPTIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 14/D-KES/TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

NO	JENIS STANDAR PELAYANAN
1.	Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Klinik
2.	Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Rumah Sakit
3.	Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Izin Puskesmas
4.	Pelayanan Rekomendasi Penilaian Kesesuaian Apotek
5.	Pelayanan Rekomendasi Penilaian Kesesuaian Toko Obat
6.	Pelayanan Rekomendasi Penilaian Kesesuaian Toko Alat Kesehatan
7.	Pelayanan Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi Tempat Fasilitas Umum (Hotel, Kolam Renang, SPA)
8.	Pelayanan Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Makanan Jajanan)
9.	Pelayanan Rekomendasi Pest Control

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA PONTIANAK
 NOMOR : 14/D-KES/TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PERIZINAN DAN STANDAR
 PELAYANAN PUSKESMAS PADA DINAS
 KESEHATAN KOTA PONTIANAK

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS

NO	STANDAR PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1.	Ruang Tindakan dan Gawat Darurat	Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
		Pelayanan Ambulance
2	Ruang Farmasi	Pelayanan Resep
3.	Ruang Pelayanan Gizi	Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Inap
		Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan
4.	Ruang Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi	Pelayanan Tata Laksana ANC
		Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
		Pelayanan Pemantauan Balita Sehat
		Pelayanan KB
		Pelayanan Calon Pengantin
		Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
		Pelayanan Pemeriksaan IVA
5.	Ruang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling	Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
		Pelayanan Konseling
6.	Ruang Laboratorium	Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)
		Pelayanan Laboratorium Rujukan (Puskesmas)
7.	Ruang Pendaftaran	Pelayanan Pendaftaran
		Pelayanan Kasir
8.	Ruang Pelayanan Persalinan Normal dan Pasca Persalinan	Pelayanan Persalinan Normal dan Emergency Dasar
		Pelayanan Bayi Baru Lahir
		Pelayanan Tata Laksana Ibu Jifas
9.	Ruang Pelayanan Gigi	Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien
		Pelayanan Pembersihan Karang Gigi
		Pelayanan Cabut Gigi
		Pelayanan Penambalan Gigi

NO	STANDAR PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
10.	Ruang Pemeriksaan Khusus	Pelayanan Pemeriksaan HIV AIDS
		Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Tuberkulosis/TB DOTS
11.	Ruang Tata Usaha	Pelayanan Administrasi
		Pelayanan Pengaduan
12.	Ruang Pemeriksaan Umum	Pelayanan Pemeriksaan Umum
		Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dokter (SKD)

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK



SANTIKO